



**RILIS KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI
KE KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
DALAM RANGKA MENINJAU JALAN BYPASS MAMMINASATA
(MAKASSAR-MAROS-SINGGUMINASA-TAKALAR)
TANGGAL: 5 - 7 JULI 2024**

Pada tanggal 5 - 7 Juli 2024, Komisi V DPR RI melaksanakan Kunker Spesifik ke Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Iqbal, SE, M.Com (Wakil Ketua Komisi V DPR RI) dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi V DPR RI dari berbagai Fraksi. Kunker ini dilaksanakan dalam rangka meninjau kegiatan pembangunan Jalan ByPass (Jalan Lingkar) Mamminasata (Makassar-Maros-Singguminasa-Takalar) di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kunjungan tersebut, dilakukan pertemuan antara Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR RI dengan Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, serta para pejabat dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR. Pertemuan itu dihadiri pula oleh Bupati Maros, Bapak. Dr.H.A.S. Chaidir Syam, S.I.P., M.I.Kom, yang didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan (PUTRPP) Kabupaten Maros. Selain itu juga hadir dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas beberapa isu terkait pembangunan Jalan ByPass Mamminasata di antaranya lambatnya progress pembangunan yang sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2015. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Jalan ByPass Mamminasata mempunyai rencana panjang total 48,175 km. Jalan ini dibangun dengan maksud mewujudkan sistem jaringan jalan yang handal dan terpadu serta untuk mengurai kemacetan. Selain itu juga diharapkan dapat membuka peluang bagi pengembangan kegiatan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan sentra-sentra produksi serta mendorong pengembangan obyek wisata di kawasan Mamminasata.

Progress pembangunan yang telah dimulai sejak tahun 2015 tersebut, terhenti pada tahun 2018. Kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2022 sampai dengan 2024 dengan membangun Segmen I dan Segmen II sekitar 3,9 km dan jembatan 128,6 m saja. Progress pembangunan yang cukup lambat ini, disebabkan oleh masalah pembebasan lahan yang tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang cukup terbatas, sementara anggaran Pemerintah Kabupaten dan Provinsi juga tidak cukup untuk membiayai pembebasan lahan.

Oleh karena itu, Komisi V DPR RI mendorong agar dilakukan upaya-upaya percepatan pembangunan Jalan ByPass ini. Beberapa alternatif solusi dimunculkan termasuk kemungkinan menjadikan Jalan ByPass ini sebagai jalan tol, sehingga bisa mengundang investor untuk ikut mendanai proyek ini. Namun hal ini harus dipertimbangkan dengan baik, mengingat Jalan Tol adalah jalan berbayar yang pembayarannya dibebankan kepada pengguna jalan. Komisi V DPR RI berharap mudah-mudahan jika pembangunan pada Segmen I dan Segmen II ini selesai, maka segera dilanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga sepuluh segmen dengan total total panjang jalan sebesar 48,175 km dapat terselesaikan

Maros, 5-7 Juli 2024

Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan